



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUBAGIYO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **248014**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.755.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m²/132 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m²/70 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m²/125 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
4. Tanah Seluas 1983 m² di KAB / KOTA MADIUN, WARISAN Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 1171 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 1171 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
7. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **640.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 417.500.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 222.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **227.200.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.448.458.410
F. HARTA LAINNYA	Rp.	145.750.000
Sub Total	Rp.	10.216.408.410
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.216.408.410

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.